



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFULLAH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 629482

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.569.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000
2. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.805.000.000
3. Tanah Seluas 819 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 39.550.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.675.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, VW GOLF Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.050.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 614.097.894**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 71.306.219**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 9.565.004.113

III. HUTANG Rp. 1.648.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.917.004.113



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.